

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2025

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V**

Sumatera Selatan - Lampung - Bangka Belitung

Jalan Inspektur Yazid
No 7490 KM 2,5
Kota Palembang

INSTAGRAM

@bp3kp_sumatera5

EMAIL

bp3kp_sumatera5@pkp.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Triwulan IV Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan triwulan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari SAKIP yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Lampung. Laporan ini sekiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan laporan ini. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan dalam penyusunan laporan selanjutnya.

Palembang, Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN SUMATERA V**



Yustin Patia Primordia, S.T., M.Si.
NIP. 19720626 199703 2 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	8

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. Target Kinerja Triwulan IV	11
B. Metode Pengukuran Kinerja	15
C. Capaian Target Triwulan	15
D. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan	20

BAB III PENUTUP

A. Rencana Tindak Lanjut	21
B. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	21

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V	11
Tabel 2.2 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker PKP Prov. Sumatera Selatan	12
Tabel 2.3 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker PKP Prov. Lampung	13
Tabel 2.4 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker PKP Prov. Bangka Belitung	14
Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V	15
Tabel 2.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	16
Tabel 2.7 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Lampung	18
Tabel 2.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Bangka Belitung	19
Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan pada Triwulan IV	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur dan Organisasi BP3KP Sumatera V	8
Gambar 1.2 Struktur Pegawai BP3KP Sumatera V	9



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk pada tahun 2024 yang secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2024. Kementerian PKP menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Kementerian PKP melaksanakan salah satu program prioritas ke-13 yaitu menjamin hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, yang terdiri atas 1 (satu) juta rumah di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta rumah di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta rumah di wilayah pesisir, yang kemudian diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai upaya dalam mencapai sasaran tersebut, Kementerian PKP menetapkan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan serta percepatan proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V sebagai bagian dari Kementerian PKP dibawah naungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PKP dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan transparan, instansi pemerintah termasuk didalamnya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu bagian dari SAKIP yaitu Laporan Kinerja Triwulan. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian PKP.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V Tahun 2024 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapiran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan merupakan pelaporan realisasi capaian dalam melakukan kegiatan, sistem pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi, serta terus mengupayakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Hal tersebut juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dalam rangka mengimplementasikan Laporan Kinerja Triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan organisasi serta dalam rangka perwujudan *good governance* melalui media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

B. Tugas dan Fungsi

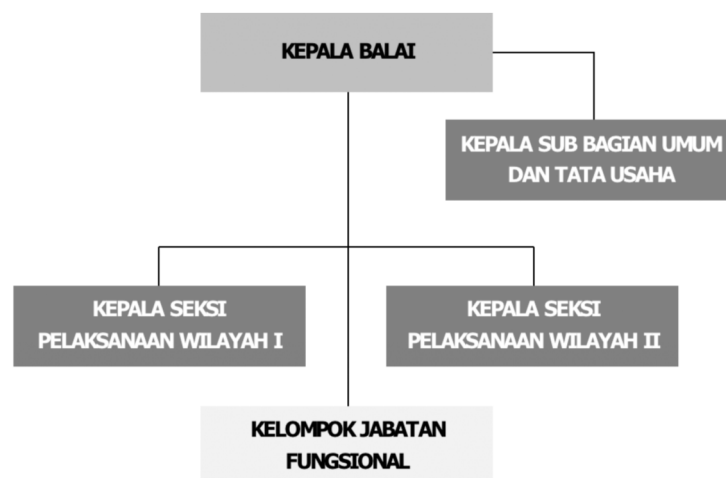
Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas, BP3KP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

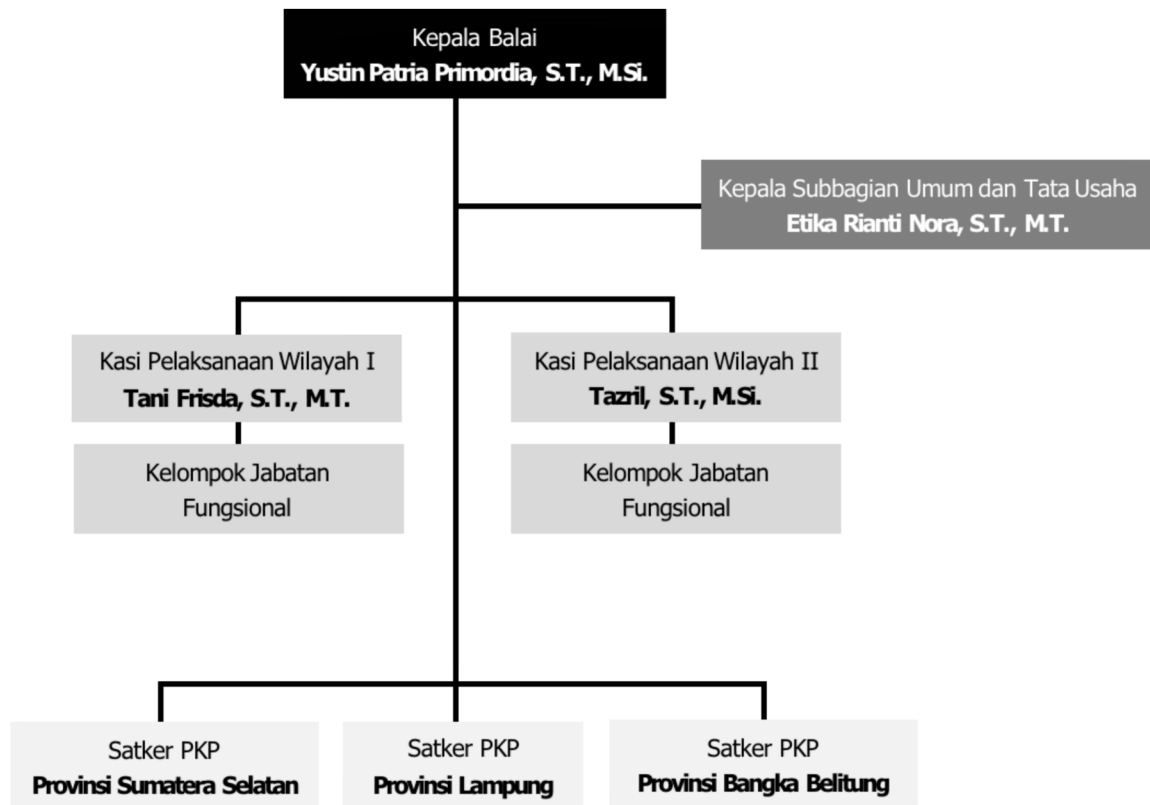
C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V menurut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur dan Organisasi BP3KP Sumatera V

Adapun struktur organisasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dapat dijabarkan melalui bagan di bawah ini.



Gambar 1.2 Struktur Pegawai BP3KP Sumatera V

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

2. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA

A. Target Kinerja Triwulan IV

Target penetapan kinerja indikator kinerja dan kegiatan pada Satuan Kerja BP2P Sumatera V pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	90.694.000	95,96	100,00
2.	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	50.000.000	91,44	100,00
3.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	330.300.000	99,57	100,00
Total			470.994.000	98,01	100,00
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	380.786.000	96,00	100,00
2.	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	190.300.000	79,42	100,00
3.	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	313.405.000	90,91	100,00
4.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	226.972.000	93,04	100,00
Total			1.111.463.000	91,12	100,00
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah	1 Kegiatan	217.536.000	63,02	100,00
2.	Kegiatan Pengendalian Program Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan di BP3KP Sumatera V	1 Layanan	146.044.000	82,38	100,00
Total			363.580.000	70,80	100,00
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					
1.	Penerapan Manajemen Risiko	1 Rekomendasi Kebijakan	174.233.000	95,77	100,00
2.	Pembangunan Zona Integritas BP3KP Sumatera V	1 Rekomendasi Kebijakan	129.233.000	98,27	100,00
Total			303.466.000	96,83	100,00

Lanjutan Tabel 2.1 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Sekretariat Jenderal					
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BP3KP Sumatera V	1 Layanan	413.996.000	94,43	100,00
2.	Langganan Daya dan Jasa	12 Bulan	98.000.000	79,96	100,00
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	151.482.000	99,69	100,00
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	12 Bulan	240.678.000	99,82	100,00
5.	Perjalanan Dinas	1 Layanan	192.469.000	99,60	100,00
Total			1.096.625.000	95,95	100,00

Sumber : e-Monitoring status 31 Desember 2025

Target penetapan kinerja indikator kinerja dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.2 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	22.000.000	95,45	95,45
2.	Perencanaan dan Supervisi Pelaksanaan PSU Kawasan Permukiman	1 Paket	90.000.000	100,00	100,00
3.	Pembangunan PSU Lingkungan Hunian	1 Paket	2.279.669.000	99,43	90,88
4.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	1 Laporan	125.000.000	78,51	78,51
5.	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Dokumen	36.000.000	98,18	98,18
6.	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Paket	1.200.000.000	100,00	100,00
7.	Pengawasan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Paket	81.004.000	69,32	69,32
Total			3.833.673.000	98,27	93,19
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	502.973.000	90,81	90,81
2.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10 Unit	200.000.000	100,00	100,00
3.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	157.592.000	45,95	45,95
4.	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Dokumen	150.000.000	98,67	98,67
5.	Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Paket	3.436.518.000	99,36	99,36
6.	MK Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Paket	177.002.000	94,54	94,54
7.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Laporan	32.859.000	60,77	60,77
Total			4.656.944.000	96,18	96,18
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	111.399.000	67,18	67,18
2.	Pelaksanaan Fisik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	356 Unit	7.120.000.000	100,00	100,00
3.	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1 Laporan	687.376.000	89,08	89,08

Lanjutan Tabel 2.2 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA	
				KEU	FISIK
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	45.972.000	47,20	47,20
Total			7.964.747.000	98,29	98,29
Sekretariat Jenderal					
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Dokumen	369.678.000	99,47	100,00
2.	Langganan Daya dan Jasa	1 Laporan	49.200.000	56,56	100,00
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	119.870.000	96,16	100,00
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Dokumen	306.446.000	96,40	100,00
5.	Layanan Umum Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Layanan	226.464.000	90,30	100,00
Total			1.071.658.000	94,32	100,00

Sumber : e-Monitoring status 31 Desember 2025

Target penetapan kinerja indikator kinerja dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.3 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Lampung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Pemataan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	115.005.000	65,68	100,00
2.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	901 Unit	18.020.000.000	100,00	100,00
3.	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1 Laporan	1.741.375.000	98,31	100,00
Total			19.876.380.000	99,65	100,00
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	197 Unit	3.940.000.000	100,00	100,00
2.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	365.943.000	77,87	100,00
3.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	501.017.000	95,37	100,00
Total			4.806.960.000	97,83	100,00
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	98.587.000	99,63	100,00
2.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1.296 Unit	25.920.000.000	100,00	100,00
3.	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1.687.436.000	99,98	100,00
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	104.658.000	99,95	100,00
Total			27.810.681.000	100,00	100,00
Sekretariat Jenderal					
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung	1 Layanan	132.117.000	98,39	100,00

Lanjutan Tabel 2.3 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Lampung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA	
				KEU	FISIK
2.	Layanan Daya dan Jasa	1 Layanan	72.000.000	83,70	100,00
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	122.116.000	99,48	100,00
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	213.200.000	92,90	100,00
5.	Layanan Umum Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	1 Layanan	200.294.000	100,00	100,00
Total			739.727.000	96,34	100,00

Sumber : e-Monitoring status 31 Desember 2025

Target penetapan kinerja indikator kinerja dan kegiatan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.4 Target Penetapan Kinerja Triwulan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Bangka Belitung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	RENCANA KEU FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	80.000.000	62,31	100,00
2.	Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Kegiatan	1.500.000.000	40,64	100,00
3.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kawasan Permukiman di Provinsi Kep. Bangka Belitung	300 Unit	6.000.000.000	100,00	94,92
4.	Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Rumah Swadaya di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	672.925.000	95,20	100,00
5.	Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	162.008.000	78,26	100,00
6.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kawasan Permukiman di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	86.148.000	51,76	100,00
Total			8.501.081.000	87,89	96,41
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Pelaksanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pelaporan	1 Laporan	502.781.000	54,98	100,00
2.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Kep. Bangka Belitung	50 Unit	1.000.000.000	100,00	98,04
3.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	192.974.000	44,61	100,00
Total			1.795.755.000	80,35	98,84
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	39.950.000	0,00	0,00
Total			39.950.000	0,00	0,00
Sekretariat Jenderal					
1.	Langgganan Daya dan Jasa	1 Layanan	27.460.000	92,06	100,00
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Layanan	453.017.000	96,10	100,00
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	28.500.000	99,32	100,00
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	16 OB	167.512.000	95,22	100,00
5.	Honorarium Pejabat Inti Satker	1 Dokumen	43.070.000	92,73	100,00
Total			719.559.000	95,67	100,00

Sumber : e-Monitoring status 31 Desember 2025

B. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa pencapaian target diukur melalui perbandingan antara realisasi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berlaku terhadap pekerjaan fisik maupun penunjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan yang berada di wilayah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V.

C. Capaian Target Triwulan

1. Capaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1.	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	90.694.000	87.030.010	95,96	100,00	95,96	100,00	100,00%
2.	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	50.000.000	45.718.268	91,44	100,00	91,44	100,00	100,00%
3.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	330.300.000	328.877.271	99,57	100,00	99,57	100,00	100,00%
Total			470.994.000	461.625.549	98,01	100,00	98,01	100,00	
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	1 Rekomendasi Kebijakan	380.786.000	365.569.196	96,00	100,00	96,00	100,00	100,00%
2.	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	190.300.000	151.134.940	79,42	100,00	79,42	100,00	100,00%

Lanjutan Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker BP3KP Sumatera V

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
3.	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	313.405.000	284.904.979	90,91	100,00	90,91	100,00	100,00%
4.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	226.972.000	211.176.873	93,04	100,00	93,04	100,00	100,00%
Total			1.111.463.000	1.012.785.988	91,12	100,00	91,12	100,00	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah	1 Kegiatan	217.536.000	137.087.670	63,02	100,00	63,02	100,00	100,00%
2.	Kegiatan Pengendalian Program Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan di BP3KP Sumatera V	1 Layanan	146.044.000	120.311.256	82,38	100,00	82,38	100,00	100,00%
Total			363.580.000	257.398.926	70,80	100,00	70,80	100,00	
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko									
1.	Penerapan Manajemen Risiko	1 Rekomendasi Kebijakan	174.233.000	166.858.615	95,77	100,00	95,77	100,00	100,00%
2.	Pembangunan Zona Integritas BP3KP Sumatera V	1 Rekomendasi Kebijakan	129.233.000	126.998.870	98,27	100,00	98,27	100,00	100,00%
Total			303.466.000	293.857.485	96,83	100,00	96,83	100,00	
Sekretariat Jenderal									
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BP3KP Sumatera V	1 Layanan	413.996.000	390.926.000	94,43	100,00	94,43	100,00	100,00%
2.	Langganan Daya dan Jasa	12 Bulan	98.000.000	78.360.216	79,96	100,00	79,96	100,00	100,00%
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	151.482.000	151.009.300	99,69	100,00	99,69	100,00	100,00%
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	12 Bulan	240.678.000	240.256.000	99,82	100,00	99,82	100,00	100,00%
5.	Perjalanan Dinas	1 Layanan	192.469.000	191.703.818	99,60	100,00	99,60	100,00	100,00%
Total			1.096.625.000	1.052.255.334	95,95	100,00	95,95	100,00	

Sumber : e-Monitoring status 31 Desember 2025

2. Capaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	22.000.000	21.000.000	95,45	95,45	95,45	95,45	100,00%
2.	Perencanaan dan Supervisi Pelaksanaan PSU Kawasan Permukiman	1 Paket	90.000.000	89.995.500	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
3.	Pembangunan PSU Lingkungan Hunian	1 Paket	2.279.669.000	2.266.676.760	99,43	90,88	99,43	90,88	100,00%
4.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	1 Laporan	125.000.000	98.132.778	78,51	78,51	78,51	78,51	100,00%
5.	Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Dokumen	36.000.000	35.344.000	98,18	98,18	98,18	98,18	100,00%
6.	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Paket	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%

Lanjutan Tabel 2.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	KEU	FISIK	KEU	FISIK	
7.	Pengawasan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Paket	81.004.000	56.156.000	69,32	69,32	69,32	69,32	100,00%
Total			3.833.673.000	3.767.305.038	98,27	93,19	98,27	93,19	
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	502.973.000	456.754.527	90,81	90,81	90,81	90,81	100,00%
2.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	10 Unit	200.000.000	200.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
3.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	157.592.000	72.412.990	45,95	45,95	45,95	45,95	100,00%
4.	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Dokumen	150.000.000	148.010.000	98,67	98,67	98,67	98,67	100,00%
5.	Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Paket	3.436.518.000	3.414.537.255	99,36	99,36	99,36	99,36	100,00%
6.	MK Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Paket	177.002.000	167.345.182	94,54	94,54	94,54	94,54	100,00%
7.	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun BPKP Palembang	1 Laporan	32.859.000	19.968.000	60,77	60,77	60,77	60,77	100,00%
Total			4.656.944.000	4.479.027.954	96,18	96,18	96,18	96,18	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	111.399.000	74.833.896	67,18	67,18	67,18	67,18	100,00%
2.	Pelaksanaan Fisik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	356 Unit	7.120.000.000	7.120.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
3.	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1 Laporan	687.376.000	612.322.954	89,08	89,08	89,08	89,08	100,00%
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	45.972.000	21.700.000	47,20	47,20	47,20	47,20	100,00%
Total			7.964.747.000	7.828.856.850	98,29	98,29	98,29	98,29	
Sekretariat Jenderal									
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Dokumen	369.678.000	367.729.960	99,47	100,00	99,47	100,00	100,00%
2.	Langganan Daya dan Jasa	1 Laporan	49.200.000	27.829.462	56,56	100,00	56,56	100,00	100,00%
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	119.870.000	115.261.312	96,16	100,00	96,16	100,00	100,00%
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Dokumen	306.446.000	295.426.000	96,40	100,00	96,40	100,00	100,00%
5.	Layanan Umum Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Layanan	226.464.000	204.489.911	90,30	100,00	90,30	100,00	100,00%
Total			1.071.658.000	1.010.736.645	94,32	100,00	94,32	100,00	

Sumber : e-Monitoring status 31 Desember 2025

3. Capaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

Tabel 2.7 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Lampung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA KEU	FISIK	REALISASI KEU	FISIK	CAPAIAN
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1.	Pematauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	115.005.000	75.537.378	65,68	100,00	65,68	100,00	100,00%
2.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	901 Unit	18.020.000.000	18.020.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
3.	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1 Laporan	1.741.375.000	1.711.896.482	98,31	100,00	98,31	100,00	100,00%
Total			19.876.380.000	19.807.433.860	99,65	100,00	99,65	100,00	
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	197 Unit	3.940.000.000	3.940.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
2.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	365.943.000	284.963.920	77,87	100,00	77,87	100,00	100,00%
3.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	501.017.000	477.798.438	95,37	100,00	95,37	100,00	100,00%
Total			4.806.960.000	4.702.762.358	97,83	100,00	97,83	100,00	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	98.587.000	98.222.788	99,63	100,00	99,63	100,00	100,00%
2.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	1.296 Unit	25.920.000.000	25.920.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
3.	Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1.687.436.000	1.687.106.835	99,98	100,00	99,98	100,00	100,00%
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	104.658.000	104.608.676	99,95	100,00	99,95	100,00	100,00%
Total			27.810.681.000	27.809.938.299	100,00	100,00	100,00	100,00	
Sekretariat Jenderal									
1.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampung	1 Layanan	132.117.000	131.585.700	98,39	100,00	98,39	100,00	100,00%
2.	Layanan Daya dan Jasa	1 Layanan	72.000.000	46.453.231	83,70	100,00	83,70	100,00	100,00%
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	122.116.000	136.277.804	99,48	100,00	99,48	100,00	100,00%
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	213.200.000	198.070.000	92,90	100,00	92,90	100,00	100,00%
5.	Layanan Umum Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	1 Layanan	200.294.000	200.293.820	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
Total			739.727.000	712.680.555	96,34	100,00	96,34	100,00	

Sumber : e-Monitoring status 31 Desember 2025

4. Capaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bangka Belitung

Tabel 2.8 Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan Satker PKP Provinsi Bangka Belitung

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SATUAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	RENCANA		REALISASI		CAPAIAN (%)
					KEU	FISIK	KEU	FISIK	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
1.	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	80.000.000	49.850.000	62,31	100,00	62,31	100,00	100,00%
2.	Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Kegiatan	1.500.000.000	609.660.000	40,64	100,00	40,64	100,00	100,00%
3.	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kawasan Permukiman di Provinsi Kep. Bangka Belitung	300 Unit	6.000.000.000	6.000.000.000	100,00	94,92	100,00	94,92	100,00%
4.	Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Rumah Swadaya di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	672.925.000	640.646.339	95,20	100,00	95,20	100,00	100,00%
5.	Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Permukiman Kumuh di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	162.008.000	126.789.109	78,26	100,00	78,26	100,00	100,00%
6.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kawasan Permukiman di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	86.148.000	44.589.009	51,76	100,00	51,76	100,00	100,00%
Total			8.501.081.000	7.471.534.457	87,89	96,41	87,89	96,41	
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1.	Pelaksanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pelaporan	1 Laporan	502.781.000	276.453.225	54,98	100,00	54,98	100,00	100,00%
2.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Kep. Bangka Belitung	50 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	98,04	100,00	98,04	100,00%
3.	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	1 Laporan	192.974.000	86.090.000	44,61	100,00	44,61	100,00	100,00%
Total			1.795.755.000	1.362.543.225	80,35	98,84	80,35	98,84	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1.	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Laporan	39.950.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total			39.950.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sekretariat Jenderal									
1.	Langgganan Daya dan Jasa	1 Layanan	27.460.000	25.279.292	92,06	100,00	92,06	100,00	100,00%
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Layanan	453.017.000	435.340.237	96,10	100,00	96,10	100,00	100,00%
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	28.500.000	28.306.094	99,32	100,00	99,32	100,00	100,00%
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	16 OB	167.512.000	159.502.000	95,22	100,00	95,22	100,00	100,00%
5.	Honorarium Pejabat Inti Satker	1 Dokumen	43.070.000	39.940.000	92,73	100,00	92,73	100,00	100,00%
Total			719.559.000	688.367.623	95,67	100,00	95,67	100,00	

Sumber : e-Monitoring status 31 Desember 2025

D. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan



BAB III

PENUTUP

A. Rencana Tidak Lanjut

Triwulan IV merupakan triwulan akhir pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Pada triwulan ini, rencana tindak lanjut kegiatan difokuskan pada upaya percepatan penyelesaian kegiatan yang termasuk dalam target di tahun 2025. Beberapa upaya tindak lanjut direncanakan supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan tepat mutu dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

B. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Rencana tindak lanjut dari permasalahan dan kendala yang dihadapi selama Triwulan III akan dilaksanakan pada Triwulan IV dan permasalahan yang terjadi pada Triwulan IV, dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan pada Triwulan IV

Triwulan Sebelumnya (Triwulan III)				Triwulan IV		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyerapan anggaran pada Triwulan III belum maksimal karena beberapa kegiatan baru saja dimulai	Akan dilaksanakan percepatan dengan mulai melaksanakan beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan menyusun rencana penyerapan anggaran agar lebih efektif	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan dan beberapa rapat perencanaan dan pelaksanaan anggaran	1.	Penyerapan anggaran masih belum maksimal namun sudah memasuki akhir tahun anggaran	Akan diupayakan untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan segera melaksanakan kegiatan yang belum sempat dilaksanakan

Lanjutan Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan pada Triwulan IV

Triwulan Sebelumnya (Triwulan III)				Triwulan IV		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Pelaksanaan kegiatan BSPS telah memasuki tahap pelaksanaan awal kegiatan	Akan dilaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan rencana kerja dan tindak lanjut yang telah disusun serta melaksanakan monitoring berkala selama pelaksanaan kegiatan	Telah dilaksanakan monitoring berkala pelaksanaan kegiatan BSPS dan sudah dimulai pengiriman material dan pembangunan awal	2.	Waktu pelaksanaan kegiatan BSPS sangat terbatas dan progres pelaksanaan belum maksimal	Terdapat perpanjangan waktu hingga 31 Maret 2026 untuk kegiatan BSPS, namun akan tetap dilaksanakan monitoring berkala sehingga dapat selesai tepat waktu baik pelaksanaan maupun pemberkasan
3.	Pelaksanaan pembangunan rumah susun memasuki tahap lelang (pemilihan penyedia jasa) menggunakan e-katalog dalam pelaksanaannya	Akan berkoordinasi dengan UKPBJ Kementerian PKP dan melaksanakan percepatan perencanaan dan penyiapan dokumen lelang menggunakan e-katalog	Telah ditetapkan pelaksana kegiatan dan memasuki tahap persiapan pencairan uang muka dan pelaksanaan awal pembangunan	3.	Pelaksanaan kegiatan MYC 2025-2026, namun progres untuk awal masih cukup rendah	Akan dilaksanakan percepatan untuk progres di tahun 2025 agar tidak berpengaruh pada progres mendatang di tahun 2026
4.	Kegiatan peningkatan kualitas sanitasi sedang memasuki tahap perencanaan awal	Akan disusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar selesai tepat sebelum tahun anggaran berakhir	Telah dibuatkan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dilanjutkan ke tahap awal pembangunan	4.	Kegiatan sanitasi telah sampai pada proses pembangunan akhir	Akan dilakukan monitoring akhir ketika pelaksanaan pembangunan selesai dilaksanakan dan mulai memproses untuk pelaksanaan serah terima

Lanjutan Tabel 3.1 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan pada Triwulan IV

Triwulan Sebelumnya (Triwulan III)				Triwulan IV		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
5.	Kegiatan Pembangunan PSU Perumahan memasuki tahap lelang pemilihan penyedia jasa yang dilaksanakan dengan e-katalog	Akan dilaksanakan percepatan perencanaan dan penyiapan dokumen lelang agar pemilihan penyedia jasa dapat segera diselesaikan serta kegiatan pembangunan dapat segera dilaksanakan	Telah terpilih penyedia jasa dan kegiatan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pembangunan yaitu pematangan lahan	5.	Kegiatan Pembangunan PSU telah sampai pada proses pembangunan akhir	Akan dilakukan monitoring akhir ketika pelaksanaan pembangunan selesai dilaksanakan dan mulai memproses untuk pelaksanaan serah terima



LAMPIRAN

- Kunjungan Anggota Komisi I DPR RI
(Kunjungan Kerja Reses Masa
Persidangan I Tahun 2025-2026)
(7 Oktober 2025)



- Monitoring Perumahan Subsidi FLPP di
Kota Palembang
(1 Oktober 2025)



- Koordinasi dan Studi Lapangan Potret
Implementasi Hunian Berimbang di Kota
Palembang
(2 Oktober 2025)



- Monitoring Perumahan Subsidi FLPP di
Kabupaten Ogan Ilir
(3-4 Oktober 2025)



- Harmonisasi Dukungan Program 3 Juta
Rumah di Provinsi Sumatera Selatan
(13 Oktober 2025)



- Koordinasi Program Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Kota
Palembang
(15 Oktober 2025)



- Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas TA 2025 di Provinsi Sumatera Selatan
(24 Oktober 2025)



- Sosialisasi Zona Integritas dan Manajemen Risiko di Provinsi Lampung
(30-31 Oktober 2025)



- Musyawarah Daerah II DPD Himpera Provinsi Lampung
(29 Oktober 2025)



- Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko dan Pembangunan Zona Integritas di Provinsi Kep. Bangka Belitung
(6-7 November 2025)



- Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Provinsi Sumatera Selatan
(13 November 2025)



- Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Sinkronisasi Pendataan Program Perumahan di Provinsi Bangka Belitung
(21 November 2025)



- Audiensi Bersama Gubernur Lampung untuk Sukseskan Program 3 Juta Rumah
(25 November 2025)



- Sosialisasi Program Perumahan dan Sinkronisasi Pendataan Perumahan di Provinsi Lampung
(25 November 2025)



- Evaluasi PGB dan BPHTB yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
(27 November 2025)



- FGD *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Selatan
(2 Desember 2025)



- Audiensi dengan BTN Syariah dan Asosiasi Pengembang mengenai Rencana Akad Massal di Akhir Tahun 2025
(2 Desember 2025)



- Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyediaan Rumah Layak Huni
(5 Desember 2025)



- Koordinasi dengan BPBPK Sumatera Selatan
(2 Desember 2025)



- Finalisasi Pendataan Capaian 3 Juta Rumah dan Penajaman Usulan Peningkatan Kualitas Perumahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung
(9 Desember 2025)



- Paparan Laporan Antara dan Akhir Penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Muaraenim
(12 Desember 2025)



- Akad Massal Pembiayaan KPR Subsidi Bank BTN Desember 2025
(10 Desember 2025)



- Penandatanganan MoU dengan LLDIKTI Wilayah II untuk Pelaksanaan Program Tahun 2026
(22 Desember 2025)



- Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Kota Pangkal Pinang
(26 Desember 2025)



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V